



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009
TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

UK-15

Kantor	(1)	Kode	(2)	Hal	da	(3)
Nomor Pengajuan	(4)	Tanggal	(5)			
Nomor Pendaftaran	(6)	Tanggal	(7)			
A. Jenis Barang Kena Cukai	☐ 18	1. Ethil Alkohol	2. MMFA	3. Gasol Fermbasam	4. Lainnya	
B. Cara Pelunasan	☐ 19	1. Pembayaran	2. Pelekatkan Pita Cukai	3. Pembubuhan Tanda Lunas Cukai lainnya		
C. Status Cukai	☐ 20	1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dilunasi			
D. Jenis Pemberitahuan	☐ 21	1. Dibayar	2. Tidak Dipungut	3. Dibebaskan	4. Lainnya	
		1.1. Tunai	2.1. Diskpor	3.1. Bahan Baku/Penolong BIA Non BKC	4.1. Dimusnahkan	
		1.2. Tunai	2.2. Ke/Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan	3.2. Iptek/Sosial/ Tenaga Ahli/ Perwakilan Asing	4.2. Diolah kembali	
		1.3. Berkala	2.3. Bahan Baku/Penolong BIA BKC	3.3. Ke TPB		
				3.4. Telah/Untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum		
				3.5. Untuk konsumsi/ Pengumpang/ Awak Sarana Pengangkut ke luar Daerah Pabean		

E. Data Pemberitahuan

<u>TEMPAT ASAL/PEMILASOK</u>		<u>TEMPAT TUJUAN/PENGUNA</u> <i>terbaca untuk tujuan ekspor langsung ke butir 15)</i>	
1. NPWP	(12)	11. Identitas	NPT/NPWP/Paspor/KIT/Lainnya(23)
2. NPPBKC	(13)	12. NPPBKC	(24)
3. Nama, Alamat	(14)	13. Nama, Alamat	(25)
4. Nama, Kode Kantor	(15)	14. Nama, Kode Kantor	(26)
			(27)
5. Nomor Invoice/Surat Jalan *)	(17)	15. Nama, Kode Negara Tujuan	(28)
6. Tanggal Invoice/Surat Jalan *)	(18)		(29)
7. Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas	(19)	16. <u>Tempat Penitbituan Terakhir</u>	
8. Tanggal Keputusan Pemberian Fasilitas	(20)	a. Identitas (NPPBKC/NPT/NPWP)	(30)
		b. Nama, Alamat	(31)
		17. Nama, Kode Kantor	(32)
9. Cara Pengangkutan	☐ 21	18. Pelabuhan Muat	(34)
	1. Darat 2. Laut 3. Udara	19. Nama, Kode Kantor	(35)
10. Jumlah, jenis Kemasan	(22)	20. Pelabuhan Singgah Terakhir	(37)
		21. Nama, Kode Kantor	(38)
			(39)

F. Urutan Barang

22. No. Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis, Merk dan Nomor Koli	24. Urutan Jenis Barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis Satuan Barang	26. HfE / HfP *) (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Denda (USD)	30. Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

G. Pemberitahuan

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.		11. <u>Urutak Pembayaran/Jamuan</u>	
Nama, Alamat	(49)	a. Pembayaran	☐ 52 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos
Identitas	(50)	b. Jamuan	☐ 53 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Excise Bond 4. Lainnya
		c. No Bukti Pembayaran/Jamuan	(54)
		d. Tanggal Bukti Pembayaran/Jamuan	(55)
		e. Kode Penerimaan	(56)
		Pegabat Penerima	Nama / Stempel Instansi
		(57)	(58)
Tempat, Tanggal Pengusaha			
.....(51)			
1. <u>Desi quah Pegabat Bea dan Cukai</u>			
Pengangkutan ke tempat tujuan/pelabuhan muat *) wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(59) setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		Nomor Buku Rekening Barang Kena Cukai:(60)	
		Tempat, Tanggal Pegabat Bea dan Cukai	
		(61)	
		(62)	
		(63)	
		(64)	
		(65)	
		(66)	
		(67)	
		(68)	
		(69)	
		(70)	
		(71)	
		(72)	
		(73)	
		(74)	
		(75)	
		(76)	
		(77)	
		(78)	
		(79)	
		(80)	
		(81)	
		(82)	
		(83)	
		(84)	
		(85)	
		(86)	
		(87)	
		(88)	
		(89)	
		(90)	
		(91)	
		(92)	
		(93)	
		(94)	
		(95)	
		(96)	
		(97)	
		(98)	
		(99)	
		(100)	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *) : (64)

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *)
Jenis dan Nomor Segel : (65)

(.....(66).....)
NIP.....(67).....

J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68)

Disegel / Tidak disegel *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pengeluaran
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Jenis Alat Angkut : (69)
No. Polisi/Voy/Flight : (70)

(.....(71).....)
NIP.....(72).....

K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR *) : (73)

Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(74).....)
NIP.....(75).....

L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76)

Disegel / Tidak disegel *)
Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai)

No. Dok. Ekspor : (77)
Tanggal : (78)

(.....(79).....)
NIP.....(80).....

M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (81)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(82).....)
NIP.....(83).....

N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *) : (84)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai

Nomor Buku Rekening : (85)
Nomor Buku Pengawasan : (86)
Nomor, Surat Pengantar : (87)
Nomor, BA Pemusnahan/
Pengolahan Kembali *) : (88)

Tanggal

(.....(89).....)
NIP.....(90).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

Kantor : (91)		Kode : (92)		Hal dari (93)				
Nomor Pengajuan : (94)		Tanggal : (95)						
Nomor Pendaftaran : (96)		Tanggal : (97)						
20. No Urut	21. Rincian jumlah, jenis Merk & Nomor Koli	22. Urutan jenis barang secara lengkap	23. Jumlah dan jenis satuan barang	24. HPP / HPP* (Rp)	25. Tarif Cukai	26. Jumlah Cukai (Rp)	27. Jumlah Devisa (USD)	28. Keterangan
(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)

*) Curret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal
Pengusaha

(..... (107))



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor.
Nomor (2) : Diisi kode Kantor.
Nomor (3) : Diisi nomor halaman.
Nomor (4) : Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (5) : Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (6) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (7) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (8) : Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor (9) : Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
Nomor (10) : Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
Nomor (11) : Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
Nomor (12) : Diisi NPWP tempat asal/pemasok.
Nomor (13) : Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok.
Nomor (14) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (15) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (16) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (17) : Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (18) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (19) : Diisi nomor skep fasilitas (bila ada).
Nomor (20) : Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada).
Nomor (21) : Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
Nomor (22) : Diisi jumlah dan jenis kemasan.
Nomor (23) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (NPP/NPWP/Paspor/KTP/lainnya).
Nomor (24) : Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki NPPBKC).
Nomor (25) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor (26) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (27) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (28) : Diisi nama negara tujuan.
Nomor (29) : Diisi kode negara tujuan.
Nomor (30) : Diisi identitas tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
Nomor (31) : Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
Nomor (32) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
Nomor (33) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Nomor (34) : Diisi pelabuhan muat.
Nomor (35) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
Nomor (36) : Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
Nomor (37) : Diisi pelabuhan singgah terakhir.
Nomor (38) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
Nomor (39) : Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
Nomor (40) : Diisi nomor urut uraian barang.
Nomor (41) : Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
Nomor (42) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor (43) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
Nomor (44) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
Nomor (45) : Diisi tarif cukai.
Nomor (46) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
Nomor (47) : Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
Nomor (48) : Diisi keterangan/informasi lainnya.
Nomor (49) : Diisi nama dan alamat pemberitahu.
Nomor (50) : Diisi nomor identitas pemberitahu.
Nomor (51) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha.
Nomor (52) : Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
Nomor (53) : Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor (54) : Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan.
Nomor (55) : Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal jaminan untuk jaminan.
Nomor (56) : Diisi kode penerimaan.
Nomor (57) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
Nomor (58) : Diisi nama dan stempel kantor penerima.
Nomor (59) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya BKC.
Nomor (60) : Diisi nomor buku rekening barang kena cukai.
Nomor (61) : Diisi nomor buku rekening kredit.
Nomor (62) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor (63) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
Nomor (64) : Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan dikeluarkan.
Nomor (65) : Diisi jenis dan nomor segel.
Nomor (66) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
Nomor (67) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (68) : Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal.
Nomor (69) : Diisi jenis alat angkut.
Nomor (70) : Diisi nomor polisi/voyage/flight.
Nomor (71) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Nomor (72) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (73) : Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
- Nomor (74) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (75) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (76) : Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (77) : Diisi nomor dokumen ekspor.
- Nomor (78) : Diisi tanggal dokumen ekspor.
- Nomor (79) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (80) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (81) : Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (82) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (83) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (84) : Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
- Nomor (85) : Diisi nomor buku rekening.
- Nomor (86) : Diisi nomor buku pengawasan.
- Nomor (87) : Diisi nomor dan tanggal surat pengantar.
- Nomor (88) : Diisi nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan kembali.
- Nomor (89) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (90) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (91) : Diisi nama Kantor.
- Nomor (92) : Diisi kode Kantor.
- Nomor (93) : Diisi nomor halaman.
- Nomor (94) : Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (95) : Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (96) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (97) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (98) : Diisi nomor urut uraian barang.
- Nomor (99) : Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- Nomor (100) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (101) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (102) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
- Nomor (103) : Diisi tarif cukai.
- Nomor (104) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (105) : Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Nomor (106) : Diisi keterangan/informasi lainnya.
Nomor (107) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

Catatan:

Lembar ke-1 untuk melindungi BKC

Lembar ke-2 untuk bendaharawan

Lembar ke-3 untuk pengusaha/lampiran PIB/ Arsip TPB

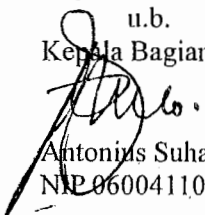
Lembar ke-4 untuk pengusaha tujuan/penerima BKC (bila ada)

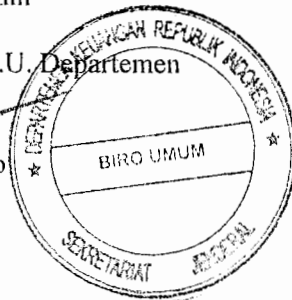
Lembar ke-5 untuk bendaharawan tujuan (bila ada)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Suharto
NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009
TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PBCK-1

Nomor :(1).....
Lampiran :(2).....
Perihal : Pemberitahuan Rencana Produksi
Barang Kena Cukai Yang
Menggunakan Barang Kena Cukai
Sebagai Bahan Baku/ Penolong
Dengan Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui:
Kepala Kantor Wilayah...(3)....
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di
.....(4).....

melalui:
Kepala Kantor Pelayanan....(5)....
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di
.....(6).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(7).....
Jabatan dalam perusahaan :(8).....
N P W P :(9).....
Alamat dan Nomor Telepon :(10).....
Nomor NPPBKC :(11).....

dalam kedudukan sebagai Produsen Barang Kena Cukai berupa(12)..... yang
menggunakan barang kena cukai berupa(13)..... sebagai bahan baku atau bahan
pembantu dalam proses pembuatannya, dengan ini menyampaikan rencana produksi dengan
penjelasan sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Perusahaan :(14).....
- b. Jenis Barang Kena Cukai yang diproduksi :(15).....
- c. Jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang
digunakan dalam proses pembuatan
setiap unit Barang Kena Cukai :(16).....
- d. Jumlah Barang Kena Cukai yang :(17).....
dibutuhkan dalam 1 tahun
- e. Jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang :(18).....
dihasilkan dalam 1 tahun
- f. Nama dan alamat Pabrik/Tempat :(19).....
Penyimpanan/Importir pemasok Barang
Kena Cukai
- g. Pelabuhan Pemasukan :(20).....
- h. Nomor NPPBKC pemasok Barang Kena :(21).....
Cukai

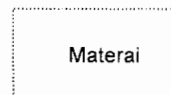
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, guna bahan penelitian seperlunya.

Dibuat di(22).....
pada tanggal(23).....

Mengetahui/menyetujui:
Pengusaha Barang Kena Cukai
Pemasok

(.....(24).....)

Pengusaha,



Materai

(.....(25).....)

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN RENCANA PRODUKSI

- Nomor (1) : Diisi nomor surat
Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran
Nomor (3) : Diisi nama kantor wilayah DJBC yang mengawasi
Nomor (4) : Diisi lokasi kantor wilayah DJBC yang mengawasi
Nomor (5) : Diisi nama kantor pelayanan DJBC yang mengawasi
Nomor (6) : Diisi lokasi kantor pelayanan DJBC yang mengawasi
Nomor (7) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan
Nomor (8) : Diisi nama jabatan dalam perusahaan
Nomor (9) : Diisi nomor NPWP perusahaan
Nomor (10) : Diisi alamat dan nomor telepon perusahaan
Nomor (11) : Diisi nomor NPPBKC
Nomor (12) : Diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi
Nomor (13) : Diisi jenis barang kena cukai yang dibutuhkan sebagai bahan baku/penolong
Nomor (14) : Diisi nama dan alamat perusahaan
Nomor (15) : Diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi
Nomor (16) : Diisi jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan dalam proses pembuatan setiap unit barang kena cukai
Nomor (17) : Diisi jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan sebagai bahan baku/penolong dalam 1 tahun
Nomor (18) : Diisi jenis dan jumlah barang kena cukai yang dihasilkan dalam 1 tahun
Nomor (19) : Diisi nama dan alamat pemasok barang kena cukai
Nomor (20) : Diisi pelabuhan pemasukan dalam hal pemasok importir
Nomor (21) : Diisi nomor NPPBKC pemasok barang kena cukai
Nomor (22) : Diisi lokasi perusahaan
Nomor (23) : Diisi tanggal surat
Nomor (24) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan pemasok barang kena cukai
Nomor (25) : Diisi nama pengusaha barang kena cukai

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

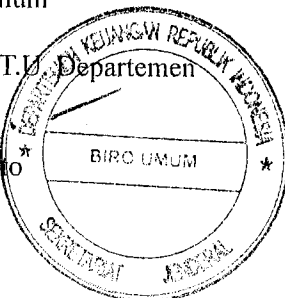
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.1 Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009
TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK - 1

Nama Perusahaan : (1) ...
NPPBKC : (2) ...
Alamat Perusahaan : (3) ...
NPWP : (4) ...
Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong : (5) ...

Laporan Bulan : (6)

No. Urut	Hasil Produksi BKC			Jumlah BKC yang digunakan				Keterangan
	Jenis	Jumlah	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pemakaian	Saldo Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9
(7)...	(8)...	(9)...	(10)...	(11)...	(12)...	(13)...	(14)...	(15)...

Dibuat di (16)
Pada Tanggal (17)
Pengusaha Pabrik

(.....(18).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (6) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.
Nomor (7) : Diisi nomor urut.
Nomor (8) : Diisi jenis hasil produksi BKC.
Nomor (9) : Diisi jumlah hasil produksi BKC.
Nomor (10) : Diisi satuan hasil produksi BKC.
Nomor (11) : Diisi saldo awal BKC yang digunakan.
Nomor (12) : Diisi jumlah pemasukan BKC ke gudang.
Nomor (13) : Diisi jumlah pemakaian BKC ke produksi BKC lainnya.
Nomor (14) : Diisi saldo akhir (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pemakaian).
Nomor (15) : Diisi keterangan lainnya.
Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
Nomor (17) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIK 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LACK-2

LAPORAN PENJUALAN/PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Nama Perusahaan :(1).....
Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Jenis BKC bahan baku/penolong :(4).....

NO.	PENJUALAN/PENYERAHAN DOKUMEN PENGELUARAN		PEMBELI/PENERIMA URAIAN		
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama Pabrik	Nomor S.I.U. Alamat Pabrik
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (11)

Dibuat di(12).....
pada tanggal(13).....
Pengusaha,

(.....(14).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (2) : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap perusahaan.
Nomor (4) : Diisi jenis barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong, misalnya hasil tembakau.
Nomor (5) : Diisi nomorurut.
Nomor (6) : Diisi nomor dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (7) : Diisi tanggal dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (8) : Diisi jumlah dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang menerima barang kena cukai, misalnya Pabrik Rokok/Pabrik Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal perusahaan yang menerima barang kena cukai
Nomor (11) : Diisi alamat perusahaan yang menerima barang kena cukai
Nomor (12) : Diisi nama kota/kabupaten perusahaan pengirim barang kena cukai
Nomor (13) : Diisi tanggal ditandatanganinya LACK-2
Nomor (14) : Diisi nama pengusaha yang menyerahkan barang kena cukai

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

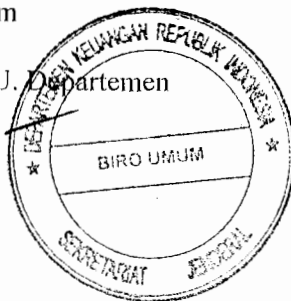
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BACK-1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NO. BAP.....(1).....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor(2).....di
.....(3).....Nomor(4)..... tanggal(5)....., kami:

1. Nama/NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....
2. Nama/NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....
3. Nama/NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....

Pada hari(9).....tanggal(10).....bulan(11).....tahun(12)..... telah
melakukan pemeriksaan barang kena cukai/pita cukai*)

Nama Perusahaan :(13).....
Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha :(14).....
Alamat :(15).....

Pada pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

Jenis BKC/Pita Cukai*)	Diberitahukan	Kedapatan
(16)	(17)	(18)
Jumlah		

Kesimpulan:(19).....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan dan
ditandatangani bersama.

.....(20).....,(21).....
Yang melakukan pemeriksaan:

1.(22).....

Pimpinan Perusahaan,

2.(22).....

(.....23.....)

3.(22).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan.
Nomor (2) : Diisi nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan DJBC, misalnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Nomor (3) : Diisi lokasi kantor sebagaimana dimaksud nomor (2).
Nomor (4) : Diisi nomor surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kantor.
Nomor (5) : Diisi tanggal surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kantor.
Nomor (6) : Diisi nama dan NIP pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan pemeriksaan.
Nomor (7) : Diisi pangkat dari pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan pemeriksaan.
Nomor (8) : Diisi jabatan dari pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan pemeriksaan.
Nomor (9) : Diisi hari dilakukannya pemeriksaan, dalam huruf.
Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukannya pemeriksaan, dalam huruf.
Nomor (11) : Diisi bulan dilakukannya pemeriksaan, dalam huruf.
Nomor (12) : Diisi tahun dilakukannya pemeriksaan, dalam huruf.
Nomor (13) : Diisi nama perusahaan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.
Nomor (14) : Diisi nomor dan tanggal S.I.U. dari perusahaan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.
Nomor (15) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.
Nomor (16) : Diisi jenis BKC atau pita cukai, misalnya etil alkohol.
Nomor (17) : Diisi jumlah BKC atau pita cukai yang diberitahukan
Nomor (18) : Diisi jumlah BKC atau pita cukai yang kedapatan pada saat dilakukan pemeriksaan
Nomor (19) : Diisi kesimpulan dari hasil pemeriksaan.
Nomor (20) : Diisi tempat dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan.
Nomor (21) : Diisi tanggal dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan.
Nomor (22) : Diisi tanda tangan dan nama pegawai DJBC yang melakukan pemeriksaan.
Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama pimpinan dari perusahaan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107

